



# Siapkan Pergub Rumah Negara

**KEPALA** Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Linda Purnama mengungkapkan, sampai saat ini masih cukup banyak aset berupa rumah dinas yang dikuasai pensiunan pejabat. "Rumah dinas, masih cukup banyak, tapi nanti kami akan pilah-pilah," ungkapnya belum lama ini.

Untuk itu ia mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) sedang menyusun peraturan gubernur (Pergub). Yakni yang mengatur tentang pengelolaan rumah negara. Dengan adanya Pergub tersebut pihaknya bakal menginventarisir ulang rumah dinas atau rumah-rumah jabatan yang ada. "Kami inventarisir ulang mana yang memang statusnya rumah jabatan, mana yang golongan II atau III. Kalau berdasarkan aturan, golongan III bisa dilakukan sewa/beli atau didum, jadi sedang kami kaji lebih lanjutlah," pungkasnya.

Sebelumnya Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, semua aset baik rumah jabatan atau lahan milik Pemprov Kalbar yang masih

• ke halaman 15 kolom 1

## Siapkan Pergub Rumah Negara

**Sambungan dari halaman 9**

dikuasai oleh pihak lain bakal ditertibkan. Hal tersebut dilakukan sesuai saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Aset itu harus bermanfaat untuk pembangunan bukan dimanfaatkan untuk perseorangan, inilah kelemahan kita," katanya.

Untuk itu dirinya bakal mempertimbangkan kebijakan baru. Bahwa ke depan

tidak ada lagi pemberian rumah dinas untuk kepala OPD. Semuanya bakal diambil alih oleh Pemprov. "Kami ambil alih, tidak ada operasional untuk rumah dinas, yang berhak rumah dinas itu hanya gubernur, wakil gubernur dan sekda yang lainnya tidak," tegasnya. Sama halnya dengan kendaraan atau mobil dinas, Midji juga akan mengeluarkan kebijakan serupa. Tidak ada lagi kepala dinas

yang berhak menggunakan mobil dinas. Penggantinya Pemprov bakal memberikan insentif dana transportasi sebesar enam sampai tujuh juta per bulannya.

"Biar lebih efisien dan tidak repot lagi. Nanti (mobil) bawa sana, bawa sini ribut lagi. Ada (rumah) yang sudah disegel, biaya lagi (penertibannya), padahal mereka tahu kalau itu rumah dinas, tidak bisa didum," terangnya. Menge-

nai berapa banyak jumlah rumah dinas yang bakal ditertibkan, ia mengaku tidak tahu pasti. Yang jelas menurutnya jumlahnya cukup banyak. "Nah kalau perlu saya bilang, kalau tidak dimanfaatkan, apalagi kalau di daerah strategis lelang saja atau di HGB (hak guna bangunan)-kan di atas HPL (hak pengelolaan). Supaya ada pertumbuhan di kawasan itu," pungkasnya. (**bar**)